

PENGARUH DAYA SAING REGIONAL TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA: ANALISIS DATA PANEL

Robby A. Sirait¹ & Jesly Y. Panjaitan²

The Impact of Regional Competitiveness To Public Welfare In Indonesia: A Panel Data Analysis

Abstract

This study aims to examine the effect of regional competitiveness for the welfare of society and analyze the achievements of the determinant variables Indonesia's competitiveness and inter-regional in Indonesia. The method used in this study is Random Effect Model by using secondary data, a panel of thirty-three provinces in Indonesia from 2010 to 2014. The result indicates that competitiveness has a positive and significant correlation to the welfare of society, which is proxied by the Human Development Index (HDI).

Keywords: Regional Competitiveness, Public Welfare, Random Effect Model

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dari sebuah proses pembangunan di sebuah negara. Untuk konteks Indonesia, peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama atau hasil akhir dari proses pembangunan jelas diamanahkan dalam konstitusi negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, secara tegas dijelaskan bahwa negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum.

United Nations Development Programme (UNDP) juga memiliki pandangan yang sama, bahwa tujuan dari pembangunan adalah mewujudkan peningkatan kesejahteraan. Dalam Human Development Report 2000, UNDP menyatakan:

"Development should begin with the fulfillment of the basic material needs of an individual including food, clothing, and shelter, and gradually reach the highest level of self-fulfillment. The most critical form of self-fulfillment include leading a long and healthy life, being educated, and enjoying a decent standard of living."

Menurut UNDP, beberapa indikator peningkatan kesejahteraan yaitu peningkatan kondisi kesehatan, pendidikan dan merasakan standar hidup yang layak merupakan. Sehingga dapat dikatakan, kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau masyarakat yang hidupnya lebih lama dan sehat, lebih berpendidikan dan memiliki standar hidup yang layak.

¹ Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan, Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lt.5, Jln. Jend Gatot Subroto Senayan, Jakarta 10270, robbysirait@dpr.go.id

² Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan, Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lt.5, Jln. Jend Gatot Subroto Senayan, Jakarta 10270, jeslypanjaitan@dpr.go.id

Definisi yang lebih luas lagi terkait kesejahteraan tercantum di Undang-Undang (UU) No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Salah satu jalur yang harus digunakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah melalui peningkatan daya saing daerah. Hal senada juga disampaikan oleh Gardiner et.al (2004), yang menyatakan bahwa daya saing mempengaruhi produktivitas wilayah dan produktivitas tersebut akan mempengaruhi kinerja regional melalui Produk Domestik Bruto Regional (PDRB). Perbaikan kinerja regional yang ditunjukkan dengan peningkatan PDRB akan mempengaruhi capaian kualitas standar hidup masyarakat. Sedangkan, menurut Dunning dan Zhang (2008), dalam Curtis et.al, menyatakan tingkat daya saing negara akan mendorong *Foreign Direct Investmet* (FDI). Moe (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi sebuah negara akan mendorong pembangunan ekonomi, yang menyebabkan peningkatan/perbaikan standar hidup masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan peningkatan investasi juga akan akan meningkatkan kualitas standar kehidupan atau tingkat kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Human Development Report 2015 yang dirilis oleh UNDP, posisi *Human Development Index* (HDI) Indonesia masih berada pada *medium human development* dengan nilai HDI sebesar 0.684. Posisi Indonesia tersebut masih relatif jauh tertinggal dengan Singapura (*very high human development*) serta Malaysia, Thailand, Brazil dan China³ yang menduduki posisi *high human development*. Perbedaan posisi memberikan pesan bahwa pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar dapat sejajar atau lebih baik dari negara-negara lain, terutama negara kawasan ASEAN. Salah satu jalur yang dapat ditempuh adalah melalui peningkatan daya saing nasional.

Dari perspektif kebijakan makro, tujuan utama daya saing adalah kesejahteraan masyarakat sebuah negara, melalui pendapatan individu, standar hidup, pembangunan manusia atau keadilan sosial (Waheeduzzaman, 2002). Hal ini juga sesuai dengan UU No.23

³ Indonesia Malaysia, Thailand, Brazil dan China merupakan negara-negara yang karakteristik ekonomi dan demografinya relatif sama.

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan salah satu jalur yang harus ditempuh untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui daya saing.

Peningkatan daya saing daerah secara kumulatif akan berdampak pada capaian daya saing nasional. Oleh karena itu, dalam kerangka meningkatkan daya saing nasional, peningkatan daya saing antar daerah atau regional menjadi sangat penting.

Untuk meningkatkan daya saing nasional, perlu dicermati variabel determinan daya saing nasional dan regional menjadi sangat penting bagi pemerintah. Meningkatkan atau memperbaiki variabel determinan daya saing merupakan langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk mengidentifikasi kondisi capaian variabel determinan daya saing serta mengidentifikasi variabel atau faktor apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga menguji pengaruh daya saing regional terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, permasalahan dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh daya saing regional terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana kondisi capaian variabel determinan daya saing Indonesia dan antar regional di Indonesia?

C. Tujuan Analisis

Tujuan utama analisis ini adalah menganalisis pengaruh daya saing regional terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan menganalisis kondisi capaian variabel determinan daya saing Indonesia dan antar regional di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Daya Saing

Dalam berbagai literatur ekonomi dan bisnis, daya saing dijelaskan melalui banyak pendekatan yang berbeda-beda (Waheeduzzaman, 2002). Daya saing tidak dapat didefinisikan secara kaku atau persisten dalam literatur ekonomi (Siggel, 2007). Tidak ada satu indikator pun yang bisa digunakan untuk mengukur daya saing, yang memang sangat sulit untuk diukur (Markovich, 2005).

Council of Competitiveness dalam Klara (2005), mendefinisikan daya saing adalah kapasitas bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil-nya. *European Commission* (1999) menyebutkan bahwa daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.

Definisi *Council of Competitiveness* dan *European Commission* tersebut, menekankan pada kemampuan atau kapasitas suatu negara di dalam persaingan pasar internasional, sebagai dasar mendefinisikan daya saing.

Tidak begitu berbeda, Siggel (2007) mendefinisikan bahwa ekonomi sebuah negara dapat dianggap berdaya saing, jika negara tersebut memiliki banyak perusahaan dan industri yang berdaya saing secara internasional, yang artinya ekspor negara tersebut harus kuat. Dengan kata lain, daya saing adalah konsep yang mengukur posisi dan kedudukan suatu negara di dalam sebuah pasar atau perdagangan.

Revealed Comparative Advantage (RCA) yang diperkenalkan oleh Ballasa (1965) bisa dijadikan salah satu titik awal dalam mendefinisikan daya saing. RCA merupakan ukuran yang merefleksikan keberhasilan ekspor sebuah negara secara relatif terhadap total ekspor dunia.

Siggel (2007) berpendapat bahwa ekspor dapat dihasilkan dari berbagai subsidi atau berbagai insentif yang ada, dan insentif-insentif tersebut dapat menjelaskan daya saing, bukan keunggulan komperatif. Oleh karena itu, indeks RCA yang dipopulerkan oleh Ballasa dapat dijadikan ukuran daya saing.

Definisi diatas secara substansi berbeda dengan definisi daya saing dalam laporan *The Global Competitiveness Report* (GCR) 2010–2011. Laporan tersebut mendefinisikan daya saing sebagai seperangkat institusi, kebijakan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat atau tingkat kemakmuran negara tersebut.

"We define competitiveness as the set of institutions, policies, and factors that determine the level of productivity of a country. The level of productivity, in turn, sets the sustainable level of prosperity that can be earned by an economy. In other words, more competitive economies tend to be able to produce higher levels of income for their citizens."

Dengan demikian, definisi daya saing menurut laporan tersebut adalah produktivitas, bukan keberhasilan suatu negara dalam persaingan pasar. Dalam laporan GCR, lebih tepat disebut sebagai definisi variabel determinan daya saing atau definisi iklim usaha yang baik daripada definisi daya saing. Hal ini senada dengan pendapat Siggel (2007), berbagai negara dapat bersaing untuk memperoleh *market share* atau *foreign investment*, tapi stabilitas, tata kelola pemerintah yang baik dan kesempatan peluang investasi, lebih baik diaggregasi sebagai suatu iklim bisnis yang baik.

Demikian juga indeks daya saing dari aggerasi 12 (dua belas) pilar pembentuk daya saing dalam laporan *The Global Competitiveness Report* 2010–2011, lebih tepat didefinisikan sebagai indikator iklim bisnis yang baik atau variabel determinan daya saing, ketimbang definisi daya saing. Ulegine et.al (2011) dengan pendekatan *Data Envelopment Analysis* terhadap 45 (empat puluh lima) negara terpilih, menggunakan skor daya saing dari *World Economic Forum (WEF)*. *WEF* memberikan tiga pilar utama daya saing antara lain *Basic Requirements*, *Efficiency Enhancers* dan *Innovation and sophistication factors* sebagai input atau kekuatan daya saing sebuah negara.

B. Ukuran Daya Saing

Dalam bagian terdahulu sudah dijelaskan bahwa banyak konsep daya saing termasuk beberapa definisi daya saing. Perbedaan konsep tersebut pada akhirnya akan berimplikasi pada alat ukur atau indikator yang berbeda-beda. Tabel 1, menggambarkan beberapa alat ukur atau indikator daya saing yang telah disarikan oleh Siggel (2007) dalam karyanya yang berjudul *"The Many Dimension of Competitiveness"*.

Tabel 1. Alat ukur atau indikator daya saing

Proposing author or organization	Measurement criterion or Indicator
Macro concepts	
Lipschitz/McDonald (1991), Marsh, Tokarick (1994), IMF	real exchange rate, real effective exch.rate
Hatsopoulos, Krugman, Summers. (1988)	trade balance with rising real income
Markusen (1992),	real income growth with free balanced trade
Dollar/Wolff (1993)	productivity
Fagerberg (1988)	market share increase
Sharpe (1986)	market share
WEF/IMD (annual since 1995)	world compet. index
Micro concepts	
Balassa (1965)	revealed comp.advantage
Bruno (1965)	domestic resource cost
Buckley et al. (1992)	composite, multi-variable
Durand/Giorno (1987), OECD	price competitiveness
Helleiner (1989)	real effective exch. rate
Hickman (1992)	unit labour cost
Jorgenson, Kuroda (1992)	price competitiveness
Krugman, Hatsopoulos (1987)	market share, change
Mandeng (1991)	market share, change
Oral (1993)	indust. mastery, unit cost
Porter (1990)	composite, multi-variable
Siggel/Cockburn (1995)	full unit cost
Swann/Taghavi (1992)	price/product attribute
Turner/Gollub (1997)	relative unit labour cost

Sumber : The Many Dimensions of Competitiveness (Siggel, 2007).

C. Variabel Determinan Daya Saing

Daya saing sebuah daerah ditentukan oleh variabel pembentuknya atau faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing tersebut. Dalam sebuah negara, kekuatan daya saing sebuah negara ditentukan oleh pondasi dan terakhir ditentukan sejumlah pilar yang masing-masing memiliki daya saing sendiri (Tambunan, 2014). Pilar-pilar tersebut adalah:

1. Alam/fisik.

Secara alami Indonesia memiliki daya saing yang jauh lebih tinggi dari Singapura berdasarkan wilayahnya, sumber daya alam. Namun dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan, Singapura dapat menciptakan/mengganti sumber daya alam tersebut.

2. Perusahaan.

Daya saing perusahaan ditentukan oleh daya saing dari pengusaha, pekerja dan input lainnya

3. Inovasi.

Inovasi ditentukan oleh kreativitas, keuletan dan pengetahuan dari *inventor*.

4. Pemerintah.

Kebijakan dan peraturan mendukung keberhasilan daya saing sebuah negara. Negara yang memiliki daya saing tinggi akan tercermin dari bentuk program, insentif, peraturan yang pro-bisnis dan juga infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang sangat baik di negara tersebut.

5. Masyarakat.

Negara yang memiliki daya saing tinggi tercermin dari masyarakatnya, seperti budaya, sikap/perbuatan atau hukum di negara tersebut.

Pada bagian terdahulu, sudah dijelaskan bahwa definisi daya saing dalam laporan GCR lebih tepat digunakan sebagai definisi variabel determinan daya saing. Artinya, pilar-pilar pembentuk indeks daya saing dalam laporan tersebut merupakan faktor atau variabel pembentuk atau yang mempengaruhi daya saing. Dalam laporan tersebut, daya saing sebuah negara ditentukan atau dibentuk dari 3 (tiga) pilar utama yakni:

1. Persyaratan Dasar (*Basic Requirement*), seperti kelembagaan, infrastruktur, stabilitas ekonomi makro dan kesehatan serta pendidikan dasar. Faktor inilah yang menjadi penggerak ekonomi.
2. Pendorong Efisiensi (*Efficiency Enhancer*), seperti pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang dan jasa, kecanggihan pasar keuangan, kesiapan teknologi dan luas pasar domestik. Faktor inilah yang menjadi pendorong efisiensi.
3. Faktor Inovasi dan Kepuasan (*Innovation and Sophistication Factors*), seperti kecanggihan bisnis dan inovasi.

Asia Competitiveness Institute (ACI) yang melakukan penilaian daya saing terhadap 33 (tiga puluh tiga) provinsi di Indonesia, menggunakan 4 (empat) pilar pembentuk atau penentu daya saing sebuah daerah di Indonesia. Keempat pilar itu antara lain:

1. Stabilitas makro ekonomi, seperti keterbukaan pada perdagangan dan jasa, penanaman modal asing, dan kekuatan daerah.
2. Pemerintah dan Perusahaan, seperti kebijakan, kepemimpinan dan peraturan atau hukum yang berlaku.
3. Keuangan, bisnis dan kondisi sumber daya manusia, seperti efisiensi bisnis, pasar tenaga kerja dan kinerja produktivitas.
4. Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, seperti infrastuktur fisik, teknologi dan standar hidup, pendidikan dan stabilitas sosial.

D. Studi Empiris Tentang Pengaruh Daya Saing Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dalam literatur, hubungan daya saing dan pembangunan manusia tidak banyak dianalisis secara mendalam (Ulegine et.al, 2011). Akan tetapi, hubungan antara daya saing dengan pertumbuhan ekonomi atau investasi telah banyak dilakukan.

Daya saing sebuah negara atau daerah memiliki korelasi kuat terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Gardiner et.al (2004) yang menyatakan bahwa daya saing mempengaruhi produktivitas wilayah dan produktivitas tersebut akan mempengaruhi kinerja regional melalui Produk Domestik Bruto Regional (PDRB). Perbaikan kinerja regional yang ditunjukkan dengan peningkatan PDRB akan mempengaruhi capaian kualitas standar hidup masyarakat. Sedangkan, menurut Dunning dan Zhang (2008), dalam Curtis et.al, menyatakan tingkat daya saing negara akan mendorong *Foreign Direct Investmet* (FDI). Moe (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi sebuah negara akan mendorong pembangunan ekonomi, yang menyebabkan peningkatan/perbaikan standar hidup masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan peningkatan investasi juga akan meningkatkan kualitas standar kehidupan atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Runtut pikir tersebut diatas, sedikit banyak menggambarkan hubungan kausalitas antara daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan daya saing sebuah negara atau daerah akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara atau daerah tersebut.

Penarikan kesimpulan tersebut diatas senada dengan Waheeduzzaman, (2002) yang menyebutkan tujuan akhir daya saing adalah meningkatkan standar hidup atau pendapatan riil masyarakat dan negara dapat mewujudkan itu dengan menawarkan barang dan jasa pada harga yang kompetitif secara internasional. Negara yang lebih kompetitif akan memberikan dampak pada peningkatan standar hidup atau pendapatan masyarakat, yang diperoleh dari perdagangan (Waheeduzzaman, 2002). Porters (1999) dalam Waheeduzzaman, mengkonfirmasi hal tersebut melalui analisis regresi terhadap sampel 58 negara. Sama halnya dengan Waheeduzzaman, Boltho dalam Ulegine et.al (2011) menyatakan bahwa dalam jangka panjang, daya saing bertujuan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat.

Konsep daya saing pada level negara adalah produktivitas. Tujuan utama sebuah negara adalah mewujudkan produksi yang tinggi dan meningkatkan standar hidup masyarakatnya, yang tergantung pada produktivitas. Produktivitas adalah determinan utama dari standar hidup dalam jangka panjang, melalui pendapatan per kapita nasional (Siggel, 2007).

Penelitian Waheeduzzaman (2002), dengan menggunakan data skor indeks daya saing dari laporan GCR dan human development index (HDI) pada 45 (empat puluh lima) negara, menunjukan ada hubungan positif dan signifikan antara daya saing dengan indeks pembangunan manusia. Akan tetapi, penggunaan HDI dan laporan GCR yang di dalamnya juga

variabel pendidikan dan kesehatan, akan berdampak pada hasil yang bias dan menjadi tidak valid.

III. METODOLOGI ANALISIS

A. Spesifikasi Model

Dalam menganalisis pengaruh daya saing terhadap kesejahteraan masyarakat, tulisan ini dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Waheeduzzaman (2002). Variabel yang digunakan untuk mengukur level kesejahteraan masyarakat dalam tulisan ini tidak berbeda dengan model Waheeduzzaman, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel proksi. Perbedaan utama dalam tulisan ini dengan model Waheeduzzaman adalah alat ukur yang digunakan dalam mengukur daya saing. Alat ukur daya saing dalam tulisan ini adalah rasio ekspor provinsi terhadap total ekspor keseluruhan provinsi.

Penggunaan alat ukur daya saing tersebut dalam tulisan ini mengadopsi atau mengikuti teori keunggulan komperatif, RCA, yang dipopulerkan oleh Ballasa (1965) dan definisi daya saing menurut Siggel (2007). Ada dua alasan, alat ukur daya saing dalam tulisan ini mengikuti pemikiran Ballasa dan Siggel. Pertama, tulisan ini memandang daya saing adalah sebuah konsep yang mengukur posisi relatif suatu negara atau daerah di dalam sebuah pasar. Kedua, definisi daya saing GCR yang digunakan oleh Waheeduzzaman lebih berhubungan dengan determinan ekonomi sebuah negara untuk memenangkan persaingan di dalam sebuah pasar. Artinya, indeks daya saing GCR adalah input pembentuk daya saing, bukan definisi dari daya saing.

Perbedaan lain dengan model Waheeduzzaman adalah tulisan ini memasukkan variabel kontrol lain yang mempengaruhi capaian kesejahteraan masyarakat yang diproksi dengan IPM. Spesifikasi model yang digunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 DS_{it} + \beta_2 PUSDEN_{it} + \beta_3 SMPDEN_{it} + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

Berdasarkan persamaan (1), Indeks Pembangunan Manusia atau Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dipengaruhi oleh daya saing (DS), jumlah puskesmas per km (PUSDEN) dan jumlah sekolah menengah pertama dan MTs per km (SMPDEN). Variabel daya saing dalam persamaan (1) adalah nilai eskpor provinsi j pada tahun t dibagi total ekspor seluruh provinsi di Indonesia pada tahun t.

B. Jenis dan Sumber Data

Tulisan ini menggunakan data sekunder berupa data panel dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi⁴ dan kurun waktu dari 2010 sampai 2014. Selain itu, tulisan ini juga menggunakan data time series untuk menganalisis kondisi capaian faktor atau variabel determinan daya saing Indonesia dan antar regional di Indonesia. Data-data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, WEF, UNDP dan ACI.

C. Teknis Analisis Data

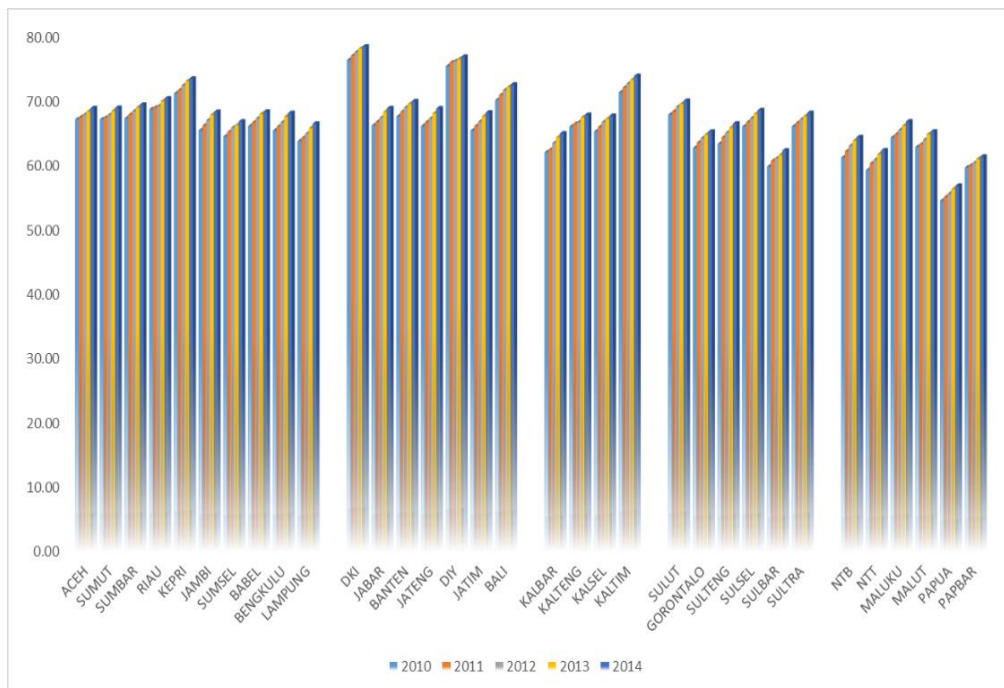
Setelah melakukan pengumpulan data, penelitian dilanjutkan dengan melakukan analisis data. Sekumpulan data yang ada dianalisis menggunakan metode analisis statistik inferensial. Dalam tulisan ini, metode estimasi yang digunakan adalah *Random Effect Model*. Sedangkan, untuk analisis kondisi capaian variabel determinan daya saing Indonesia dan antar regional di Indonesia, tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif terhadap beberapa variabel dan data terpilih.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskriptif Tentang Kesejahteraan Masyarakat

Capaian IPM menurut provinsi di Indonesia mengalami peningkatan dari 2010 sampai 2014 untuk keseluruhan provinsi. Untuk tahun 2014, IPM provinsi DKI Jakarta merupakan tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia sebesar 78,39, disusul DIY Yogyakarta sebesar 76,81 dan Kalimantan Timur sebesar 73,82. Sedangkan IPM terendah adalah provinsi Papua sebesar 56,75, Papua Barat sebesar 61,28 dan Sulawesi Barat sebesar 62,24.

⁴ Tidak termasuk Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 1. Capaian IPM Menurut Provinsi Tahun 2010 – 2014

Sumber : BPS, diolah.

Jika membandingkan capaian IPM menurut wilayah, capaian IPM provinsi-provinsi yang berada di wilayah timur Indonesia relatif lebih rendah dan tertinggal dibandingkan provinsi di barat Indonesia. Provinsi NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang capaian IPM relatif jauh tertinggal dibandingkan provinsi di Pulau Sumatera, Jawa dan Bali.

B. Hasil Estimasi

1. Uji *Likelihood Ratio Test* dan *Hausman Test*

Sebelum melakukan pengujian empiris pengaruh daya saing regional terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, model pengujian terlebih dahulu diuji melalui *Likelihood Ratio Test* dan *Hausman Test* untuk mengetahui pendekatan apa yang akan digunakan. Hasil test menunjukkan bahwa pendekatan model yang tepat digunakan adalah *Random Effect Model*.

2. Pembahasan

Hasil uji empiris pengaruh daya saing regional terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan *Random Effect Model* dan perangkat lunak Eviews 8.0 disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2. Hasil Estimasi Pengaruh Daya Saing Regional Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

IPM = 66.25 + 61.86*DS - 0.00*PUSDEN - 0.01*SMPDEN			
(0,00)	(0,00)*	(0,18)	(0,02)**
N = 33 R ² = 0,3585 Prob = 0.00			

Keterangan: * dan ** masing-masing signifikan pada level $\alpha = 1\%$ dan $\alpha = 5\%$

Hasil estimasi pada tabel 2 menunjukkan bahwa model yang digunakan telah valid secara statistik. Hal ini ditunjukkan dari F-Statistic (probabilitas model 0,00) yang signifikan pada tingkat kepercayaan 1 persen. Model juga menunjukkan bahwa variabel daya saing, jumlah puskesmas per km dan jumlah SMP dan MTs per km secara bersama-sama signifikan mempengaruhi capaian IPM.

Daya saing sebuah negara atau wilayah/regional berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian negara atau wilayah tersebut. Peningkatan produktivitas negara tersebut, pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut, melalui peningkatan pendapatan per kapita. Siggel (2007) menyebutkan bahwa produktivitas adalah determinan utama dari standar hidup dalam jangka panjang melalui pendapatan per kapita nasional.

Berdasarkan tabel 2, hasil estimasi menunjukkan bahwa daya saing regional berpengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diproksi menggunakan IPM. Hasil studi ini sejalan dengan pernyataan Ulegine et.al (2011), Siggel (2007) dan hasil temuan Porters (1999) pada sampel 58 negara terpilih.

C. Analisis Kondisi Variabel Determinan Daya Saing

Pada bagian sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa daya saing memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur atau diproksi dengan IPM. Artinya, dalam konteks meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang merupakan amanah konstitusi UUD NRI 1945, maka peningkatan daya saing nasional maupun regional merupakan salah satu jalur yang harus ditempuh oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Peningkatan daya saing dimaksud, dapat direalisasikan dengan melakukan perbaikan dan peningkatan pada variabel determinan atau pembentuk daya saing sebuah negara atau wilayah/region. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan berbagai variabel determinan

pembentuk daya saing, baik menurut *GCR*, Tambunan (2014) maupun *ACI*. Dalam studi ini, analisis faktor atau variabel determinan daya saing Indonesia menggunakan variabel dan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, *ACI* dan *GCR*.

Tabel 2. Capaian 12 pilar GCR Indonesia Tahun 2009 – 2015

PILAR/TAHUN	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Institusi	4	4	3.8	3.9	4	4.1	4.1
Infrastruktur	3.2	3.6	3.8	3.7	4.2	4.4	4.2
Kondisi Makroekonomi	4.8	5.2	5.7	5.7	5.8	5.5	5.5
Kesehatan dan Pendidikan Dasar	5.2	5.8	5.7	5.7	5.7	5.7	5.6
Pendidikan Tinggi dan Pelatihan	3.9	4.2	4.2	4.2	4.3	4.5	4.5
Efisiensi Pasar Barang	4.5	4.3	4.2	4.3	4.4	4.5	4.4
Efisiensi Pasar Tenaga Kerja	4.3	4.2	4.1	3.9	4	3.8	3.7
Pengembangan Pasar Keuangan	4.3	4.2	4.1	4.1	4.2	4.5	4.2
Teknologi	3.2	3.2	3.3	3.6	3.7	3.6	3.5
Ukuran Pasar	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.7
Kualitas Dunia Usaha	4.5	4.4	4.2	4.3	4.4	4.5	4.3
Inovasi	3.6	3.7	3.6	3.6	3.8	3.9	3.9

Sumber : GCR berbagai tahun, diolah

Dari tabel 3, diketahui perbandingan capaian Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya di tahun 2009 dan tahun 2015, seluruh pilar atau variabel determinan daya saing Indonesia secara relatif mengalami tren perbaikan. Meskipun demikian, capaian tersebut masih tertinggal dari capaian Singapura, Malaysia dan Thailand.

Tabel 3. Perbandingan Capaian Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya, Tahun 2009 – 2015

PILAR/TAHUN	Indonesia		Singapura		Thailand		Malaysia		Vietnam		Filipina	
	2009	2015	2009	2015	2009	2015	2009	2015	2009	2015	2009	2015
Institusi	4	4.1	6.2	6.0	4.0	3.7	4.5	5.1	3.9	3.7	3.2	3.8
Infrastruktur	3.2	4.2	6.4	6.5	4.6	4.6	5.1	5.5	3.0	3.8	2.9	3.4
Kondisi Makroekonomi	4.8	5.5	5.2	6.2	5.4	5.7	5.0	5.4	3.9	4.7	4.5	5.7
Kesehatan dan Pendidikan Dasar	5.2	5.6	6.2	6.7	5.5	5.8	5.9	6.3	5.3	5.9	5.1	5.5
Pendidikan Tinggi dan Pelatihan	3.9	4.5	5.6	6.2	4.3	4.6	4.5	5.0	3.5	3.8	3.9	4.5
Efisiensi Pasar Barang	4.5	4.4	5.8	5.7	4.5	4.7	4.8	5.4	4.2	4.2	3.9	4.2
Efisiensi Pasar Tenaga Kerja	4.3	3.7	5.9	5.7	4.8	4.2	4.7	4.9	4.7	4.4	3.9	4.1
Pengembangan Pasar Keuangan	4.3	4.2	5.9	5.6	4.5	4.4	5.4	5.2	4.1	3.7	3.9	4.2
Teknologi	3.2	3.5	5.9	6.2	3.7	4.2	4.5	4.6	3.5	3.3	3.3	3.9
Ukuran Pasar	5.2	5.7	4.5	4.8	5.0	5.2	4.7	5.0	4.6	4.8	4.6	4.9
Kualitas Dunia Usaha	4.5	4.3	5.2	5.1	4.4	4.4	4.8	5.3	4.0	3.6	4.1	4.3
Inovasi	3.6	3.9	5.1	5.2	3.3	3.4	4.1	4.8	3.5	3.2	2.8	3.5
Overall	4.3	4.5	5.6	5.7	4.6	4.6	4.9	5.2	4.0	4.3	3.9	4.4
Rank	54	37	3	2	36	32	24	18	75	56	87	47

Sumber : GCR berbagai tahun, diolah

Jika melihat capaian dari seluruh pilar pembentuk, pilar infrastruktur merupakan salah satu pilar yang perlu mendapat perhatian lebih khusus untuk mendorong peningkatan daya saing Indonesia. Untuk pilar infrastruktur, sub pilar *quality of roads*, *quality of port infrastructure* dan *quality of electricity supply* harus menjadi prioritas. Capaian ketiga sub pilar

tersebut masih berada dibawah rata-rata capaian dunia. Pilar lain yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah pilar teknologi, efisiensi tenaga kerja, inovasi dan birokrasi.

Untuk variabel determinan daya saing antar provinsi di Indonesia, tulisan ini menggunakan angka indeks daya saing dalam laporan ACI. Dengan data tahun 2011, laporan ACI menunjukkan bahwa provinsi-provinsi yang berada di wilayah barat Indonesia (khususnya pulau Jawa) lebih berdaya saing dibandingkan dengan yang berada di timur Indonesia. Artinya, capaian variabel determinan daya saing provinsi di barat Indonesia secara agrerasi jauh lebih baik dibandingkan dengan yang berada di timur Indonesia.

DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan provinsi yang indeks daya saingnya tertinggi. Sedangkan terendah adalah Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Papua, NTT dan Maluku Utara. Dari laporan ACI tersebut, juga terlihat bahwa provinsi NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat merupakan provinsi yang daya saingnya rendah dan jauh tertinggal dibandingkan provinsi di pulau Jawa, bahkan cenderung sangat timpang.

Capaian yang relatif jauh atau timpang ini linear dengan beberapa variabel yang dapat dikategorikan variabel determinan daya saing, antara lain jumlah dokter, puskesmas, sekolah, rasio elektrifikasi, akses terhadap sanitasi dan air bersih serta ketersediaan jalan yang juga timpang. Ketimpangan variabel-variabel tersebut terlihat pada tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan beberapa variabel determinan daya saing tahun 2014

WILAYAH	RASIO DOKTER/PUS KESMAS	PUSKESMAS DENSITY	SMP DESNSITY	RASIO ELEKTRIFIKASI	AKSES SANITASI LAYAK (%)	AKSES AIR MINUM LAYAK (%)	RASIO PANJANG JALAN DAN LUAS WILAYAH
Sumatera	2.29	205.30	41.80	81.46	51.08	61.49	0.37
Jawa dan Bali	2.22	34.12	6.13	87.15	72.74	77.15	0.81
Kalimantan	1.71	624.43	139.33	75.04	40.19	63.10	0.10
Sulawesi	2.07	161.47	35.46	74.11	63.57	64.65	0.39
Nusa Tenggara	1.30	124.61	22.22	59.69	36.06	58.29	0.48
Maluku	1.25	244.99	64.08	68.69	60.33	62.49	0.19
Papua	1.50	730.45	464.49	39.51	45.29	59.11	0.05

Sumber : BPS, Kementerian Kesehatan & Kementerian PUPR, diolah.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian yang telah dilakukan dalam tulisan ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, hasil estimasi menunjukkan bahwa daya saing berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diproksi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kedua, capaian determinan daya saing Indonesia sejak 2009 sampai dengan 2015 mengalami trend perbaikan. Namun, capaian tersebut masih tertinggal dengan Singapura, Thailand dan Malaysia.

Ketiga, prioritas variabel determinan daya saing Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing nasional adalah infrastruktur. Infrastruktur kualitas jalan, kualitas pelabuhan dan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan merupakan sub infrastruktur yang harus menjadi prioritas.

Keempat, teknologi, efisiensi tenaga kerja, inovasi dan birokrasi merupakan variabel determinan daya saing yang juga harus mendapatkan perhatian khusus dan prioritas.

Kelima, variabel determinan daya saing provinsi di wilayah timur Indonesia, khususnya Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, relatif tertinggal jauh dengan provinsi di barat Indonesia, khususnya pulau Jawa.

B. Rekomendasi

Capaian kinerja daya saing setiap provinsi secara kumulatif akan berdampak pada capaian daya saing nasional. Oleh karena itu, dalam kerangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nasional, peran pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan daya saing setiap provinsi menjadi penting. Regulasi dan kebijakan anggaran negara yang diarahkan pada upaya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat daya saing, baik regional maupun nasional, merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah.

Upaya ini sangat penting untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang merupakan pesaing Indonesia di kawasan ASEAN, baik dari segi capaian daya saing maupun tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya dimaksud hendaknya dijalankan sinergis dan simultan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing daerahnya masing-masing. Upaya yang sinergis dan simultan

tersebut harus terwujud, mengingat daya saing daerah sangat bergantung pada kualitas kinerja pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Bergesarnya rezim pemerintahan yang sentralisasi kepada rezim desentralisasi di Indonesia, meletakkan peran pelayanan publik lebih besar di tingkatan daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota. Artinya, perubahan rezim ini memberikan pengertian bahwa peningkatan daya saing daerah sangat bergantung pada pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusty, G.J., Damayanti, S.M., The Effect Of Foreign Direct Investment & Official Development Assistance To Human Development Index Of Developing Countries In 2009-2013, *Journal Of Business And Management*, Vol. 4, No.8, 2015: 882-889
- Badan Pusat Statistik (2014). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014*. Jakarta: BPS.
- Curtis, T., Rhoades, D.L., & Griffin, T. (2013). Effects of Global Competitiveness, Human Development, and Corruption on Inward Foreign Direct Investment. Diakses pada 10 Februari 2016 dari http://commons.erau.edu/dbmanagement/21/?utm_source=commons.erau.edu%2Fdbmanagement%2F21&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.
- Gardiner, Ben., Martin, Ron. & Tyler, Peter. (2004). *Competitiveness, Productivity and Economic Growth across the European Regions*. London: The Regional Studies Association's.
- Giap, Tan Khee, et al (2014). "Competitiveness Analysis and Development Strategies for 33 Indonesian Provinces". Singapore: World Scientific.
- Gujarati. D (1995). *Basic Econometrics* (3rd ed.). New York : Mc. Graw Hill
- Markovich, Klara. (2005). *Competitiveness of Domestic Small and Medium Enterprises in the European Union, European Integration Studies*. Diakses pada 9 februari 2016 dari www.uni-miskolc.hu/uni/res/.../markovics.doc.
- Midgley, James (1997). *Social Welfare in Global Context*, London: Sage Publications.
- Melliana, A. & Zain, I. (2013). Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*, Vol. 2, No.2, 237-242.
- Moe, T. L. (2008). An empirical investigation of relationships between official development assistance (ODA) and human and educational development. *International Journal of Social Economics*, 35(3), 202-221
- Ogundaria, K. & Aromolaranb, A.B (2014). Impact of Education on Household Welfare in Nigeria. *International Economic Journal*, Volume 28, Issue 2, 2014, 345-364.
- Porter, Michael.E. (1990). "The Competitive Advantage of Nations". *Harvard Business Review*, March-April 1990, 73-91.
- Seldadyo, Harry. (2009). *Pemekaran Daerah: Mencari Alternatif Ke Arah Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: UNDP-Bappenas.
- Siggel, Eckhard. (2007). "The Many Dimensions of Competitiveness". CESifo Venice Summer Institute.
- Soebagyo. D.. Triyono. Cahyono. Y.T.. *Regional Competitiveness and Its Implications for Development*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 14. Nomor 2. Desember 2013. hlm.160-171.
- Tambunan, Tulus (2014). *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- TNP2K (2010). *Indikator Kesejahteraan Rakyat : Pendidikan (Buku II)*. Jakarta: TNP2K
- TNP2K (2010). *Indikator Kesejahteraan Rakyat : Kesehatan (Buku III)*. Jakarta: TNP2K

- Ulegin, Fusun. et.al. (2011). "The Competitiveness of Nations and Impication For Human Developmnet". Socio Economic Planning Sciences, Vol.45, 16-27.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- United Nations Development Programme (2000). Human Development Report 2000. New York: United Nations Development Programme.
- United Nations Development Programme (2010). Human Development Report 2010. New York: United Nations Development Programme
- United Nations Development Programme (2014). Human Development Report 2014. New York: United Nations Development Programme
- Waheeduzzaman, A.N.M. "Competitiveness, Human Development and Inequality: A Cross National Comparative Inquiry. Competitiveness Review, Vol 12, No.2, 13-29.
- World Economic Forum (2009). The Global Competitiveness Report 2009-2010. Geneva: World Economic Forum.
- World Economic Forum (2013). The Global Competitiveness Report 2013-2014. Geneva: World Economic Forum.
- World Economic Forum (2015). The Global Competitiveness Report 2015-2016. Geneva: World Economic Forum. Badan Pusat Statistik (2014). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014. Jakarta: BPS.